

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2018-2021

Tiara Adelia Suryani Nugroho
NPP. 30.0859

Asdaf Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Keuangan Publik
adeliaasurya@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Haromin, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research was conducted based on the financial conditions in Jember Regency which continue to experience fluctuations, especially in the realization of local revenue (PAD). **Purpose:** This research was conducted with the aim of analyzing and knowing the development of the performance level of the Jember Regency Regional Government finances. **Method:** The research method used is descriptive qualitative. Meanwhile, data analysis was carried out using four financial ratios, namely the regional financial independence ratio, the IKR ratio, the budget effectiveness ratio, and the budget efficiency ratio. **Result:** The results of the analysis of the four ratios show that the level of regional financial independence in Jember Regency during the last four years is still low and the level of dependence on financial assistance from the central and provincial governments is still very high. On the other hand, the IKR and effectiveness ratios show an increase in general, but both are still in the very low and less ranges. Only the budget efficiency ratio shows a good percentage increase. This shows that the percentage increase in Jember Regency's PAD has not been able to offset the percentage of total regional routine expenditure, so that the region is still very dependent on financial assistance from the central and provincial governments. **Conclusion:** The condition of Jember Regency's financial performance can be said to be unstable and if there is no effort to improve it, it will lead Jember Regency to bankruptcy. This research is expected to be an early warning for local regional governments regarding the financial conditions of their regions so that they can determine the next steps to improve the financial performance conditions of their respective regions.

Keywords: Financial independence, the index routine capabilities, the effectiveness of the budget, budget efficiency.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penelitian ini dilakukan berdasarkan kondisi keuangan di Kabupaten Jember yang terus mengalami fluktuasi ketidakstabilan khususnya dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya. **Tujuan** : Untuk menganalisis dan mengetahui perkembangan tingkat kinerja dari keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. **Metode** : penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan empat rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio IKR, rasio efektivitas anggaran, serta rasio efisiensi anggaran. **Hasil/Temuan** : Temuan dari analisis keempat rasio tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jember selama empat tahun terakhir masih rendah dan tingkat ketergantungan atas bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun provinsi masih sangat tinggi. Di sisi lain untuk rasio IKR maupun efektivitas menunjukkan kenaikan secara umum tetapi keduanya masih tetap berada di rentang sangat rendah dan kurang. Hanya rasio efisiensi anggaran yang menunjukkan presentase peningkatan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi peningkatan PAD Kabupaten Jember masih belum dapat mengimbangi presentase total belanja rutin daerahnya, sehingga daerah masih sangat bergantung kepada bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun provinsi. **Kesimpulan** : Kondisi kinerja keuangan Kabupaten Jember bisa dikatakan tidak stabil dan jika tidak adanya upaya dalam memperbaiki hal tersebut akan membawa Kabupaten Jember ke arah kebangkrutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi *early warning* bagi pemerintah daerah setempat mengenai kondisi keuangan daerahnya sehingga dapat menentukan langkah-langkah kedepannya untuk meningkatkan kondisi kinerja keuangan daerah masing-masing. **Kata Kunci** : Kemandirian keuangan, IKR, efektivitas anggaran, efisiensi anggaran.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terlihat dari pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Pengertian dari pengelolaan keuangan daerah itu sendiri menurut Dadang Suwanda (2014), yaitu “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.” Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang mandiri (tidak bergantung pada pemerintah pusat), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum yang berlaku), dan transparan (terbuka bagi seluruh masyarakat) bagi daerah. Secara lebih lanjut, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal tata

kelola keuangan daerah diatur dalam Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang di dalamnya dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan aturan dan kaidah yang berlaku serta dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu asas dalam hubungan antara keuangan pusat dan keuangan daerah adalah asas desentralisasi fiskal. Disamping asas desentralisasi fiskal, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga ditunjukkan dengan asas desentralisasi. Dimana desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Adanya otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk bisa lebih mandiri khususnya dalam masalah pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, dana perimbangan tetap diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, dengan bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan kebijakan penggunaan ke tiga dana tersebut tetap diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Konsekuensi lain dari dilaksanakannya otonomi daerah adalah tuntutan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk lebih mandiri dan dapat membiayai sendiri seluruh kegiatan penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang telah menjadi kewenangan daerah tersebut. Hal itu menandakan bahwa pemerintah daerah harus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya karena PAD merupakan tolak ukur keberhasilan dari suatu daerah di dalam melaksanakan otonomi. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan, maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dan semakin berhasil suatu daerah tersebut dalam menjalankan otonominya. Berikut adalah rekapitulasi ketersediaan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemda Jember:

Tabel 1. 1
Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Jember T.A 2018 s/d 2021

No	Tahun Anggaran	APBD	PAD	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	%
1	2018	589,28 M	597,51 M	101.40
2	2019	630,62 M	667,60 M	105.86
3	2020	750,02 M	593,18 M	79.09
4	2021	716,85 M	635,31 M	88.62

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id

Informasi yang terdapat pada tabel 1.1 di atas memperlihatkan bahwa besaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember untuk periode anggaran tahun 2018 sampai tahun 2021 relatif tidak stabil. Sempat terjadi penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun APBD di tahun 2020. Sedangkan untuk realisasi anggarannya relatif mengalami penurunan secara terus menerus setelah tahun 2019. Hasil analisis tabel tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum mampu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya secara berkesinambungan. Kabupaten Jember belum dapat menstabilkan perealisasi anggaran PAD per tahunnya. Dan dapat juga dikatakan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan PAD masih lemah. Masalah yang sering muncul dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga pendapatan daerah belum dapat dipungut secara optimal Mardiasmo (2000)

Berdasarkan data di atas, jika ditelisik lebih lanjut dalam konteks otonomi daerah, kemampuan pemerintah daerah di dalam menyelenggarakan otonomi dapat dilihat dari seberapa signifikannya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerahnya. Hal tersebut ditunjukkan oleh kontribusi PAD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota tersebut. Sejatinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat selalu mengalami peningkatan tiap tahun demi mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan keuangan yang dapat berujung pada kebangkrutan daerah tersebut. Entitas khususnya pemerintah perlu mengenali dan memperhatikan tanda-tanda dari kebangkrutan dan melakukan usaha pencegahan potensi kebangkrutan melalui peningkatan pendapatannya. Oleh karena itu untuk mencegah timbulnya kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan, diperlukan adanya analisis terhadap laporan keuangan di dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Menurut Fauziana (2009), yaitu "kondisi kesulitan keuangan dapat dijelaskan berdasarkan dua titik ekstrem yaitu kesulitan keuangan jangka pendek disebut kesulitan likuiditas dan merupakan yang paling ringan." Selanjutnya kesulitan keuangan tidak solvable (*insolvency*) yang merupakan kesulitan keuangan paling parah.

kondisi kinerja keuangan bisa dilihat melalui analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaksanakan tiap tahun anggaran dengan menggunakan indikator tertentu. Hasil dari analisis dan perhitungan dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam mengetahui kinerja keuangan daerah di dalam penyelenggaraan otonomi daerahnya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam laporan keuangan daerah Kabupaten Jember selama empat tahun terakhir, yaitu tahun anggaran 2018 hingga 2021. Hal tersebut berupa teradapatnya fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan atau ketidakstabilannya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasinya terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah per tahunnya. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa pengelolaan

keuangan daerah khususnya Kabupaten Jember di dalam pelaksanaan otonomi daerahnya belum stabil.

1.3 Penelitian terdahulu

Penelitian dari Dora Detisa (2009) dimana dijelaskan mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam era otonomi khusus pada Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, Rasio Efektivitas dan Efisiensi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perhitungan analisis kinerja keuangan sangat dibutuhkan dalam era pelaksanaan otonomi daerah saat ini.

Kemudian pada penelitian kedua Dyvita Febriyanti (2011) memaparkan analisis rasio keuangan guna mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa Timur. Dengan menggunakan beberapa rasio keuangan diantaranya Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), Analisis Tren. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai bagaimana mengetahui kesiapan daerah khususnya Provinsi Jawa Timur dalam mengelola keuangannya dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yang ada.

Selanjutnya pada penelitian ketiga Karisma, Maslichah, Afifudin (2022) melakukan penelitian tentang perkembangan kondisi kesehatan keuangan daerah Kota Probolinggo dengan menggunakan indikator yang berbeda dengan dua penelitian sebelumnya. Yaitu menggunakan indikator Kondisi Keuangan Permendagri No. 19 Tahun 2020. Kesehatan keuangan yang baik diperlukan dalam stabilnya keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang ada. penelitian ini menggunakan indikator Solvabilitas Jangka Pendek, Solvabilitas Jangka Panjang, Solvabilitas Layanan, Analisis setelah penarikan kesimpulan terhadap data

1.4 Pernyataan kebaruan ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian terbaru yang berbeda dengan penelitian terdahulu dan belum pernah dilakukan sebelumnya yakni Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018-2021. Penelitian dilakukan dengan menggunakan empat rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio indeks kemampuan rutin, rasio efektivitas anggaran, serta rasio efisiensi anggaran. Dan hasil penelitian berupa kondisi terkini kinerja keuangan daerah dalam empat tahun terakhir di Kabupaten Jember.

1.5 Tujuan

Penelitian ini dibuat dengan harapan mampu memberikan gambaran perkembangan kinerja keuangan daerah Kabupaten Jember selama tahun anggaran 2018-2021 dan mendapatkan informasi mengenai faktor apa saja yang menghambat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember sebagai lokus penelitiannya dalam meningkatkan kinerja keuangan daerahnya serta mengetahui upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember dalam mengatasi faktor penghambat dalam proses peningkatan kinerja keuangan daerahnya.

II. METODE

Pandangan Sugiyono (2013) menyampaikan bahwa :

Penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang umum

Sedangkan metode kualitatif itu sendiri seperti yang dikemukakan Moleong (2004), yaitu:

Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pada kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang deskriptif Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Mardiasmo (2002) ada empat tolok ukur yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu :

1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam APBD
2. Efisiensi biaya
3. Efektivitas program
4. Pemerataan dan keadilan

Guna melakukan analisis terhadap kinerja pemerintah, dilakukan analisis rasio terhadap realisasi APBD. Hasil analisis rasio keuangan tersebut, selanjutnya digunakan sebagai tolok ukur dalam Suprpto (2006) :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam rangka mendukung terlaksananya otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

3.1 Analisis Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Jember

Analisis kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan suatu daerah tersebut dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pelayanan, serta pembangunan daerahnya tanpa campur

tangan bantuan dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian daerah dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian daerah tersebut dengan membandingkan antara total Penerimaan Asli Daerah (PAD) dengan total bantuan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa semakin kecilnya ketergantungan daerah tersebut akan bantuan keuangan dari pemerintah pusat di dalam penyelenggaraan otonomi daerahnya.

Tabel 3. 1Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018-2021

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Total Bantuan Pemerintah Pusat	%Tkd	Kemandirian
2018	609.304.818.610,50	2.227.331.774.000,00	27,35 %	Rendah
2019	662.481.418.206,46	1.910.641.451.000,00	34,67 %	Rendah
2020	660.367.999.055,62	2.122.025.650.000,00	31,12 %	Rendah
2021	719.879.915.555,00	1.704.810.011.000,00	42,22 %	Rendah

Sumber: diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa Tingkat Kemandirian Daerah dari Kabupaten Jember selama empat tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami sedikit fluktuasi karena sempat menurun dari 3,55% di tahun 2020. Secara garis besar Kabupaten Jember masih belum dapat dikatakan mandiri dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakatnya, masih bergantung kepada bantuan Pemerintah Pusat. Hal tersebut ditunjukkan dari kriteria kemandirian daerahnya yang tetap berada di **kategori rendah** selama empat tahun terakhir.

3.2 Analisis Tingkat Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

Kemampuan rutin suatu daerah adalah kemampuan keuangan daerah tersebut dalam mengelola potensi pendapatannya sendiri hingga dapat membiayai belanja rutin daerahnya. Rasio IKR didapat dengan membandingkan antara total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total belanja rutin daerahnya. Nilai rasio IKR yang semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap sumber pendapatan selain PAD di dalam membiayai belanja rutinnya semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, nilai IKR yang rendah menunjukkan bahwa daerah itu masih sangat bergantung pada sumber pendapatan selain PAD di dalam membiayai belanja rutinnya.

Tabel 3.2 Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018-2021

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Total Belanja Rutin	%IKR	Kemandirian
2018	609.304.818.610,50	3.713.874.336.944,97	16,40 %	Sangat Kurang
2019	662.481.418.206,46	4.054.339.811.197,36	16,34 %	Sangat Kurang
2020	660.367.999.055,62	3.376.841.796.797,66	19,55 %	Sangat Kurang
2021	719.879.915.555,00	3.857.213.672.370,00	18,66%	Sangat Kurang

Sumber: diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa Indeks Kemampuan Rutin dari Kabupaten Jember selama empat tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami fluktuasi naik turun. Setelah mengalami penurunan di Tahun 2019 sebesar 6% dari awalnya 16,40% menjadi 16,34%, IKR Kabupaten Jember mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 3,21% di Tahun 2020 yaitu menjadi 19,55%. Kemudian kembali mengalami penurunan sebesar 0,89% di Tahun 2021 menjadi 18,66%. Secara garis besar IKR Kabupaten Jember masih dikatakan **sangat kurang**, dan masih sangat bergantung kepada sumber pendapatan selain PAD dalam membiayai belanja rutin daerahnya.

3.3 Analisis Tingkat Rasio Efektivitas Anggaran

Efektivitas menunjukkan berhasil tidaknya suatu entitas di dalam mencapai tujuan awal yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan rasio efektivitas itu sendiri menunjukkan bagaimana kemampuan suatu daerah di dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dibandingkan total target penerimaan PAD berdasarkan potensinya. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas anggarannya maka semakin efektif juga usaha daerah tersebut dalam mencapai tujuannya.

Tabel 3.3 Tingkat Efektivitas Anggaran Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018-2021

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD berdasarkan Potensi Riil	%Efektivitas	Efektivitas
2018	597.509.388.023,37	609.304.818.610,50	98,06 %	Cukup Efektif
2019	667.598.426.909,96	662.481.418.206,46	100,77%	Sangat Efektif
2020	593.175.154.485,65	660.367.999.055,62	89,82 %	Kurang Efektif
2021	635.305.965.623,24	719.879.915.555,00	88,25%	Kurang Efektif

Sumber: diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat diketahui bahwa Tingkat Keefektivitasan dari Kabupaten Jember dalam merealisasikan anggaran PAD nya selama empat tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami fluktuasi naik turun dan cenderung mengalami penurunan terus menerus di tiga tahun terakhir. Setelah mengalami kenaikan di Tahun 2019 sebesar 2,71% dari yang awalnya 98,06% menjadi 100,77%, Tingkat Keefektivitasan Kabupaten Jember mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 10,95% di Tahun 2020 yaitu menjadi 89,82%. Kemudian mengalami penurunan kembali sebesar 1,57% di Tahun 2021 menjadi 88,25%. Secara garis besar, performa Pemerintah Kabupaten Jember dalam merealisasikan anggaran PADnya masih kurang dan perlu ditingkatkan kedepannya, hal ini dikarenakan tingkat keefektivitasan yang terus menerus menurun sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 yang menunjukkan kegiatan pemungutan PADnya belum berjalan dengan cukup efektif dan perlu ditingkatkan kembali.

3.4 Analisis Tingkat Rasio Efisiensi Anggaran

Analisis rasio efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya. Suatu daerah dikatakan tidak efisien dalam mengelola anggarannya jika total biaya pemungutan PAD lebih banyak dari realisasi PADnya. Pemerintah daerah perlu menghitung dengan cermat total biaya yang diperlukan dengan mempertimbangkan total pendapatan yang akan dihasilkannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih diantara keduanya.

Tabel 3.4 Tingkat Efisiensi Anggaran Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018-2021

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan PAD	Realisasi PAD	%Efisiensi	Efisiensi
2018	4.941.107.577,00	597.509.388.023,37	0,82%	Sangat Efisien
2019	4.304.649.925,00	667.598.426.909,96	0,65%	Sangat Efisien
2020	3.268.710.000,00	593.175.154.485,65	0,55%	Sangat Efisien
2021	6.190.046.800,00	635.305.965.623,24	0,97%	Sangat Efisien

Sumber: diolah oleh penulis (2023)

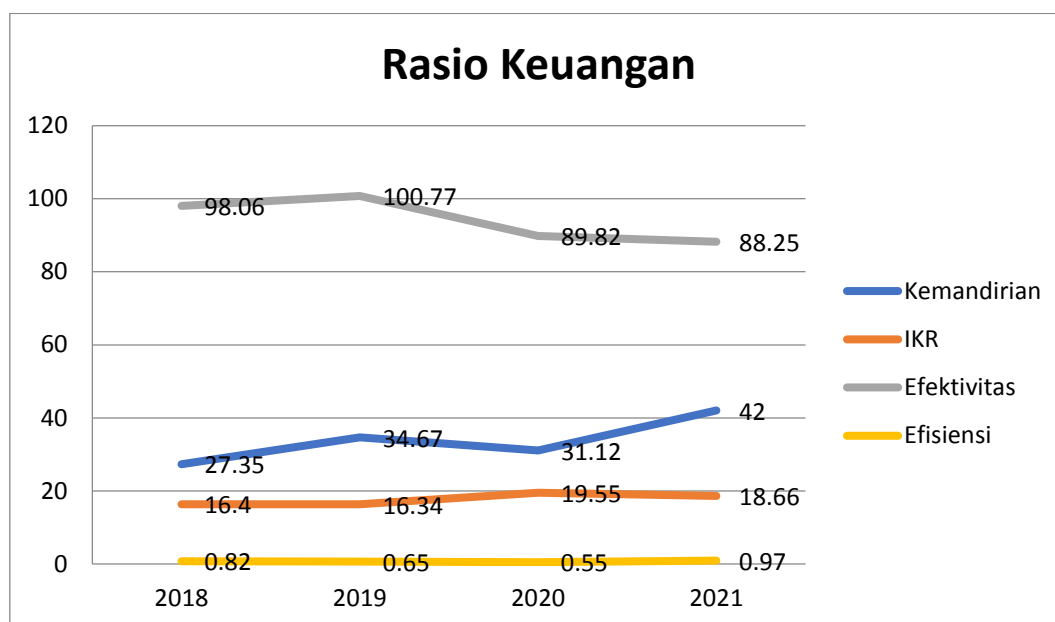
Berdasarkan tabel 3.4 diatas dapat diketahui bahwa Tingkat Keefisien an dari Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengelola keuangan daerahnya selama empat tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2021 sangatlah efisien dan baik. Meskipun sedikit mengalami fluktuasi naik turun, terutama kenaikan yang terjadi di Tahun 2021 sebesar 0,42%. Akan tetapi, indikator efisiensi keuangan daerah Kabupaten Jember menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Kabupaten Jember sangat efisien dengan rentang nilai di bawah 60% pertahunnya.

3.5 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Jember

Berikut di dalam tabel 3.5 menggambarkan bagaimana gambaran dari hasil analisis empat rasio keuangan yang digunakan sebelumnya. Serta bagaimana keterkaitan pada masing-masing rasio sebagai berikut:



Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Jember Tahun Anggaran 2018-2021



Sumber: diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa untuk Rasio Kemandirian bisa dikatakan mengalami peningkatan yang cukup stabil meskipun sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 dari yang awalnya 34,67% menjadi 31,12%. Jika dilihat dari nominal PAD yang dimiliki Kabupaten Jember itu sendiri, nominalnya cenderung meningkat setiap tahun, kecuali di Tahun 2020. Dan di sisi lain, presentase peningkatan nominal PAD tersebut tidaklah diimbangi dan sebanding dengan presentase peningkatan dana bantuan dari pemerintah pusat per tahunnya. Sehingga nilai kemandirian Kabupaten Jember belum bisa mencapai indikator **tinggi** dalam empat tahun terakhir ini.

3.6 Faktor Penghambat

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh BPKAD Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan daerahnya tidak terlepas dari masih perlu ditingkatkannya PAD Kabupaten Jember per tahunnya, hal ini dikarenakan PAD Kabupaten Jember masih belum dapat menutupi atau membiayai belanja rutin daerahnya dengan maksimal. Kabupaten Jember masih sangat tergantung dengan bantuan dari pemerintah pusat dalam menjalankan keuangannya. Kontribusi PAD masih kurang sehingga perlu dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kontribusi PAD khususnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Jember.

3.7 Upaya dalam Mengatasi Hambatan

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember salah satunya dengan intensifikasi Pendapatan Daerah (PAD). Contoh pelaksanaan intensifikasi PAD yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Jember diantaranya berupa:

- a. Kegiatan Pemutakhiran data Obyek Pajak Daerah;

- b. Kegiatan Penyuluhan dan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah kepada masyarakat setempat;
- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset kepada pegawai;
- d. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
- e. Memaksimalkan kegiatan yang merupakan aset daerah, seperti kegiatan *Jember Fashion Carnaval* (JFC). Dengan diselenggarakannya kegiatan seperti *Jember Fashion Carnaval* (JFC) dapat menarik banyak wisatawan ke daerah Jember sehingga dapat menaikkan *income* pendapatan khususnya pada pajak hiburan.

Selain usaha untuk meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember juga berusaha mengurangi alokasi belanja rutinnya sehingga pembangunan di daerahnya tersebut semakin meningkat

3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dora Detisa pada tahun 2009 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Khusus Pada Pemerintahan Nanggro Aceh Darussalam memiliki persamaan temuan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Temuan tersebut terletak pada hasil analisis kinerja daerahnya yang menunjukkan masih besarnya ketergantungan daerah akan bantuan keuangan dari pemerintah pusat, sebagaimana temuan yang peneliti lakukan pada Kabupaten Jember.

Penelitian yang dilakukan oleh Dyvita Febriyanti pada tahun 2011 dengan judul Analisis Rasio Keuangan Guna Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa Timur Periode Anggaran 2006- 2009 memiliki perbedaan temuan dengan yang peneliti lakukan. Pada penelitian ini diketahui bahwa kinerja keuangan khususnya Se-Jawa Timur tergolong cukup baik, pemerintah daerahnya telah dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya, dan tidak serta merta bergantung sepenuhnya pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Hal ini berbeda dengan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Jember yang masih sangat bergantung dengan bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

Penelitian ke tiga yang dilakukan oleh Karisma, Maslichah, Afifudin di tahun 2022 dengan judul Analisis Perkembangan Kondisi Kesehatan Keuangan Daerah Melalui Pengukuran Indikator Kondisi Keuangan Permendagri No 19 Tahun 2020 (Studi Kasus Kota Probolinggo Tahun 2017-2020) memiliki persamaan temuan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Meskipun dengan perbedaan indikator, akan tetapi kedua hasil penelitian ini sama-sama menggambarkan kondisi kinerja keuangan yang belum mencapai taraf optimal dalam pengelolaannya.

4 Kesimpulan

1.1 Kesimpulan

1. Tingkat kinerja keuangan daerah Kabupaten Jember dalam rentang empat tahun (2018-2021) menunjukkan bahwa kemandirian daerah, kemampuan PAD daerah dalam membelanjakan belanja rutin daerahnya, serta ke efektivitas an pengelolaan keuangan daerahnya masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan. Meskipun begitu, biaya pemungutan PAD yang dilakukan Kabupaten Jember berada pada indikator yang sangat efisien dalam empat tahun terakhir. Hambatan yang terjadi pada saat melakukan penelitian yaitu keterlambatan OPD saat input data, dokumen fisik penyusunan perencanaan anggaran terlalu tebal, selanjutnya tidak memiliki hak akses untuk merubah dan menetapkan kegiatan, kemudian verifikasi TAPD yang membutuhkan waktu lama. BPPKAD senantiasa memberikan solusi yang kooperatif agar sistem ini tetap berjalan semestinya dan penyusunan anggaran akan sesuai dengan tujuan hasil yang memuaskan mencapai target dan sasaran yang diacapai khususnya dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
2. Belum optimalnya tingkat kinerja keuangan daerah Kabupaten Jember dikarenakan masih kalahnya jumlah nominal PAD dengan total bantuan dari pemerintah pusat, sehingga Kabupaten Jember masih sangat bergantung kepada bantuan pemerintah pusat di dalam mengelola keuangan daerahnya, serta tingginya nominal belanja rutin pertahun.
3. Usaha yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Jember dalam meningkatkan PAD nya melalui intensifikasi PAD, salah satu contohnya berupa pengoptimalan penyelenggaraan aset daerah seperti Jember Fashion Carnival (JFC) yang dapat meningkatkan pendapatan khususnya dalam pajak hiburan.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki penulis maka dilakukan pembatasan masalah agar tidak terjadi kekaburan dan kesimpangsiuran dalam pembahasan nantinya. Adapun dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan pada analisis kinerja keuangan daerah dalam lingkup analisis laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari penelitian ini tergolong baru, oleh karena itu peneliti menyarankan kepada rekan-rekan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan Analisis Kinerja Keuangan Daerah dengan menggunakan indikator rasio yang lebih beragam pada lokus yang sama agar bisa menemukan hasil yang lebih mendalam dan dapat melihat perkembangan kedepannya.

1.2 Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember perlu meningkatkan kembali usahanya dalam mewujudkan kinerja keuangan daerah yang optimal, serta menurunkan tingkat ketergantungan atas bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi terhadap pengelolaan keuangan daerahnya.

Usaha tersebut dapat dilakukan melalui intensifikasi PAD, meminimalisir alokasi belanja rutin dan meningkatkan alokasi belanja modal, serta memanfaatkan segala asset daerah yang ada. Bukan hanya *Jember Fashion Carnival*, aset pendukung yang lain seperti pariwisata Pantai Payangan, pariwisata Bukit Rembangan, maupun sarana hiburan lainnya bisa dijadikan alternatif dalam meningkatkan pendapatan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

2. Penambahan variable rasio keuangan lainnya dapat dilakukan bagi peneliti selanjutnya untuk mendapatkan analisis data yang lebih mendalam.
3. Perluasan obyek penelitian serta lebih panjangnya periode pengamatan yang dilakukan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya dengan mengacu pada penelitian ini.

5 UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Dr. Hadi Prabowo, M.M selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Dr. Halilul Khairi, M.Si selaku Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Dr. Marja Sinurat, M.Pd, M.M selaku Kepala Program Studi Keuangan Publik, Bapak Haromin, S.Sos., M.Si selaku Dosen pembimbing yang penuh kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan skripsi; Bapak Dr. Tun Huseno., M.Si dan Dr. Drs. Eko Subowo, MBA selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan, nasihat, motivasi, serta ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini; Bapak/Ibu Dosen Pengajar, Pelatih dan Pengasuh serta seluruh Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Segenap Dosen, Pelatih, Pengasuh, Karyawan serta seluruh Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember serta seluruh masyarakat Kabupaten Jember yang telah membantu saya dalam pelaksanaan penelitian; Sahabat yang selalu memberikan bantuan serta dukungannya dalam menyelesaikan Skripsi ini; Rekan-rekan angkatan XXX SATYA HAPRABU; Dulur Kontingen Jawa Timur XXX yang telah berjuang bersama dari awal pendidikan hingga saat ini; Rekan-rekan kelas F6 yang selama 4 tahun ini menemani masa-masa perkuliahan; Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

6 DAFTAR PUSTAKA

Detisa, Dora. 2009. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Khusus pada Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara Medan.

Fauziana, A. 2009. "*Analisis Rasio Keuangan Dan Model Z-Score Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan (Kasus Pada Pt. Atmaja Jaya Di Batur (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).*"

Febriyanti, Dyvita. 2011. *Analisis Rasio Keuangan Guna Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur Periode Anggaran Tahun 2006-2009*. Skripsi. Universitas Jember.

Karisma, Maslichah, and Affifudin. (2022). "Analisis Perkembangan Kondisi Kesehatan Keuangan Daerah Melalui Pengukuran Indikator Kondisi Keuangan Permendagri No 19 Tahun 2020 (Studi Kasus Kota Probolinggo Tahun 2017-2020)." Malang: Penerbit E-JRA.

Mardiasmo, Drs, and A. M. (2000). "Akuntansi Keuangan Dasar." Cetakan Pe.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Moleong, Lexi J., and P. R. R. B. E. (2004). "Metodologi penelitian." Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.

Sugiyono, P. D. (2013). "Metode Penelitian Manajemen Bandung Alf." CV.

Suprpto, T. (2006). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Suwanda, Dadang, and Hendri Santosa. 2014. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

